



Contents lists available at [Journal IICET](#)
JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Kebijakan pengembangan ecowisata berbasis komunitas di Indonesia: sebuah pendekatan quadruple helix

Gede Wirata^{*)}, Made Mulia Handayani, Made Ayu Desy Geriadi
Universitas Ngurah Rai, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Nov 08th, 2022

Revised Jul 25th, 2023

Accepted Aug 13th, 2023

Keyword:

Pengembangan ecowisata,
Berbasis komunitas,
Quadruple helix

ABSTRACT

Dalam realitanya pembangunan kepariwisataan di Indonesia pada umumnya masih belum mampu mewujudkan pariwisata yang ekowisata (ecotourist). Dalam pengembangan ekowisata, terdapat beberapa instansi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan membuat kebijakan dan perundang-undangan tentang ekowisata termasuk didalamnya yaitu universitas, publik, industri, dan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi quadruple helix dalam kebijakan pengembangan ecowisata berbasis komunitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya sebatas keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tetapi lebih lanjut peran serta juga mengandung pengertian bahwa masyarakat terlibat dalam setiap tahap dari suatu kegiatan sampai dengan menilai apakah pembangunan sudah sesuai dengan rencana dan dapat meningkatkan ekonominya. Universitas sebagai institusi pendidikan telah berkontribusi dalam kepariwisataan melalui kajian ilmiah terkait desa wisata dan program wisata, melalui pendampingan pembentukan desa wisata di beberapa obyek wisata. Peran industri dalam ekowisata yaitu berperan dalam peningkatan roda perekonomian daerah melalui pemanfaatan objek wisata untuk memperoleh benefit yang maksimal serta peran pemerintah dan masyarakat dalam objek wisata agar tetap berkelanjutan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Gede Wirata,
Universitas Ngurah Rai
Email: gedewirata17@gmail.com

Pendahuluan

Pasca pandemic Indonesia mulai bangkit wisatanya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan warisan sejarah yang menarik bagi para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Potensi pemulihan sektor pariwisata bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti penerapan langkah-langkah keamanan dan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi wisatawan dan masyarakat setempat. Selain itu, promosi pariwisata yang efektif dan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait juga dapat membantu membangkitkan industri pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang menjanjikan dalam mendukung perekonomian suatu wilayah. Selain itu Pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah (Aeni & Astuti, 2019).

Beragam variasi objek wisata terus dikembangkan guna meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap daerah tersebut. Indonesia sebagai salah satu ikon pariwisata di Dunia seakan tidak pernah berhenti memunculkan objek-objek wisata baru yang selalu mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dimana daya Tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah kekayaan alam, budaya, dan buatan manusia yang khas, indah, dan bernilai tinggi yang menarik wisatawan (Anggela et al., 2017). Di antara berbagai macam jenis objek wisata yang ada, wisata dengan tema alam dapat dikatakan selalu memiliki daya tarik tersendiri. Berbicara tentang wisata alam tentu tidak lepas dari konsep ekowisata, yang menitikberatkan pada pengembangan objek wisata tanpa mengorbankan kualitas dari ekosistem yang ada.

Pariwisata yang berkembang membuat tingkat kesejahteraan terjaga (Rulloh, 2018). Sedemikian pentingnya keberadaan pariwisata dan keberlanjutannya bagi masyarakat sekitar obyek wisata, hingga pemerintah senantiasa berupaya untuk menjaga keberlanjutannya dan berupaya meminimalisir sisi negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata itu sendiri. Karenanya dengan adanya pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi (Suryani, 2017). Sisi negatif dari pengembangan pariwisata disadari atau tidak telah mempengaruhi taraf kehidupan masyarakat. Seperti misalnya eksplorasi pariwisata dapat berpengaruh pada alih fungsi lahan di beberapa tempat, pergeseran nilai-nilai budaya serta munculnya gangguan ketertiban sosial lainnya. Untuk meminimalisir dampak negatif dari industri pariwisata, maka pengembangan pariwisata yang didasarkan pada keunikan dan kondisi wilayah dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan pembangunan pariwisata ekologi (ecotourism) atau pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) dalam bentuk ekowisata. Dimana dalam pengembangan ekowisata, penting untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat, sehingga keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata tidak merugikan lingkungan dan budaya setempat (Suryanti & Indrayasa, 2021).

Pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Indonesia menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan manfaat ekonomi dari kegiatan ekowisata. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta melestarikan dan menghormati warisan budaya dan lingkungan alam mereka. Pengembangan ekowisata berbasis komunitas merupakan pendekatan yang penting dalam menciptakan kesinambungan sektor pariwisata di Indonesia (Prihanta et al., 2017). Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangan, ekowisata dapat menjadi sumber kebanggaan dan pendapatan yang berkelanjutan bagi komunitas, sambil tetap memelihara kekayaan alam dan budaya yang ada. Peraturan tentang ekowisata di Indonesia ditur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yaitu "Ekowisata merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal" (Permendagri, 2009).

Berdasarkan pengertian tersebut, ekowisata merupakan bentuk wisata yang harus mengkombinasikan beberapa hal sebagai berikut: (1) perjalanan ke suatu kawasan (seperti hutan alam, goa, kehidupan bawah laut, kehidupan masyarakat hukum adat, kehidupan perkotaan, dan sebagainya), (2) aktivitas pembelajaran (learning) dalam rangka meningkatkan pengalaman wisatawan, (3) menggalakkan upaya konservasi flora, fauna, dan budaya, serta (4) mengembangkan kepedulian dan kapasitas masyarakat lokal. Dengan demikian, ekowisata dapat dibedakan menurut tujuan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang dipilihnya, jenis pengalaman yang diinginkan, tingkat perhatian konservasi sumber daya alamnya dan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan. Dalam realitanya pembangunan kepariwisataan di Indonesia pada umumnya masih belum mampu mewujudkan pariwisata yang ekowisata (ecotourist) (Larantika, 2019). Karena pariwisata massal (mass tourism) yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan masih mendominasi praktek pengembangan pariwisata. Penyebab kurang tergalinya dan terkelolanya objek ekowisata (Asmin, 2018) dapat dilihat dalam konteks sistem kepariwisataan itu sendiri, yaitu adanya kendala pada sisi suplai (product driven), kurangnya pemahaman terhadap pasar (market driven), banyaknya kendala dalam kelembagaan dan kurangnya dukungan kebijakan.

Pada pengembangan ekowisata nasional, sesungguhnya aspek regulasi dan kebijakan menjadi sangat penting untuk dikaji sebagai dasar orientasi para pihak dalam mengimplementasikan pembangunan pariwisata di berbagai daerah (Nasution et al., 2018). Kegagalan pengembangan ekowisata terjadi karena terjadinya tumpang tindih pengelolaan, disharmoni kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan ego sektoral pada setiap kementerian selaku penanggungjawab pembangunan ekowisata. Dalam pengembangan ekowisata, terdapat beberapa instansi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan membuat kebijakan dan perundang-undangan tentang ekowisata termasuk didalamnya yaitu universitas, publik, industri, dan

pemerintah. Oleh karenanya menjadi menarik untuk mengulas tentang bagaimana peran keempat instansi tersebut dalam kebijakan pengembangan ecowisata berbasis komunitas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan quadruple helix. Penelitian yang dilakukan oleh (Larantika, 2019) menyatakan bahwa untuk dapat menanggulangi kendala dalam pengembangan ekowisata, diperlukan kebijakan yang melibatkan kerjasama semua aktor kebijakan.

Kerjasama semua aktor memberi kesempatan aktor tersebut untuk berkontribusi sesuai peran dan kompetensinya masing-masing dalam pengembangan ekowisata. Kontribusi Warmadewa sebagai salah satu aktor kebijakan belum maksimal. Kontribusi dapat lebih maksimal bila keterlibatannya dimulai dari perumusan kebijakan ekowisata, tidak semata-mata pada implementasi kebijakan yang sudah ada. Kontribusi dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah. Bila semua aktor kebijakan dapat memainkan perannya sesuai porsinya, maka kendala dalam ekowisata akan dapat diminimalisir dan pengembangan ekowisata akan mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi quadruple helix dalam kebijakan pengembangan ecowisata berbasis komunitas di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kenyataan sosial dengan menggunakan data-data. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata dan bukan data yang terbatas pada angka-angka. Penggunaan desain penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan model quadruple helix pada kebijakan pengembangan ecowisata berbasis komunitas di Indonesia. Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Ibrahim, 2015). Sesuai dengan penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Teknik analisis data interaktif di perkenalkan oleh yang diawali dari pengumpulan data (data collection), Kondensasi data (data condensation), Penyajian data (data display), dan diakhiri dengan kesimpulan (conclusion) (Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Pengembangan Ecowisata

Tugas dan fungsi Kemendagri di dalam pengembangan ekowisata diwujudkan dalam dua bentuk kebijakan, yaitu kebijakan tertulis berupa peraturan menteri dan kebijakan operasional. Peraturan menteri terkait ekowisata diterbitkan pada tahun 2010 mengatur tentang pengembangan ekowisata daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa dana tugas pembantuan untuk daerah yang memiliki potensi ekowisata. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah. Sejak awal tahun 2008 sampai pertengahan 2009 Kementerian Dalam Negeri melalui Subdit Penataan Ruang Kawasan mengupayakan perumusan aturan yang dapat mengakomodasi pengembangan ekowisata di daerah. Perumusan aturan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang meliputi: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai leading institution dalam ekowisata; Kementerian Kehutanan; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Koordinator Perekonomian; beberapa LSM yang terlibat dalam ekowisata, dan; Perguruan Tinggi. Permen tersebut kemudian disahkan pada 7 Juli 2009 dengan nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah.

Aturan dalam permendagri tersebut menegaskan agar pengembangan ekowisata di daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata yang meliputi kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata, konservasi, ekonomis, edukasi, kepuasan dan pengalaman pengunjung, partisipasi masyarakat, dan menampung kearifan lokal. Pengembangan ekowisata dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang dilakukan secara terpadu oleh pelaku ekowisata (Meilani & Muntasib, 2013). Keterpaduan antar pelaku ekowisata menjadi kata kunci dalam pengembangan ekowisata daerah yang diharapkan akan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan ekowisata sehingga ekowisata di Indonesia akan dapat berkembang secara optimal dan dapat menjadi sumber pendapatan Negara dan daerah.

Permendagri tersebut hingga tahun 2011 masih menjadi satu-satunya kebijakan tertulis yang diterbitkan oleh Kemendagri berkaitan dengan ekowisata dan menjadi pedoman bersama untuk pengembangan ekowisata daerah. Hal ini berarti bahwa terkait dengan fungsinya sebagai perumus kebijakan, Kemendagri telah melaksanakan peran dan tanggungjawab sebagai instansi pemerintah sesuai ketentuan dalam deklarasi Quebec. Namun demikian masih ada berbagai peran dan tanggung jawab lainnya dalam deklarasi tersebut yang tampaknya masih perlu dilakukan oleh Kemendagri terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Peran Publik Dalam Kebijakan Pengembangan Ecowisata

Menurut (Manalu et al., 2013) menyatakan bahwa didalam pengembangan ekowisata, peran serta masyarakat lokal tidak bisa diabaikan. Masyarakat lokal lebih tahu tentang daerahnya dan pada orang dan luar, karena itu keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan dan pemantauan hasil ekowisata sangat diperlukan. Dalam tahap perencanaan diperlukan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, karena dalam tahap perencanaan ini masyarakat diajak untuk membuat suatu keputusan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab untuk turut mengembangkannya. Seperti pendapat Davis K (Rivai, 2013) yang menyatakan bahwa peran serta atau partisipasi adalah keterlibatan mental, pikiran dan emosi (perasaan) seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Dalam pengertian ini ada tiga unsur penting dari peran serta/partisipasi yaitu: (1) peran serta masyarakat merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, bukan hanya semata-mata keterlibatan secara jasmaniah, (2) kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan. Hal ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok, (1) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Oleh karena itu peran serta masyarakat tidak hanya sebatas keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tetapi lebih lanjut peran serta juga mengandung pengertian bahwa masyarakat terlibat dalam setiap tahap dari suatu kegiatan sampai dengan menilai apakah pembangunan sudah sesuai dengan rencana dan dapat meningkatkan ekonominya. Menurut (Mastur, 2003) secara garis besar ada tiga tahapan dalam peran serta/partisipasi yaitu peran serta/partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasilnya. Diantara ketiga tahapan itu yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajad keterlibatannya adalah peran serta/partisipasi pada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan orang sekaligus diajak turut membuat keputusan. Syarat tumbuhnya peran serta menurut Surnarto (Sunarto, 1994) dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu: (1) ada kesempatan untuk ikut dalam Pembangunan, (2) ada kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan, (3) ada kemauan untuk berperan serta.

Dalam penelitian ini analisis peran serta masyarakat dikaitkan dengan kegiatan masyarakat yang menunjukkan sering tidaknya masyarakat melakukan kegiatan yang mendukung usaha pelestarian lingkungan; sering tidaknya masyarakat melakukan kegiatan sendiri maupun bersama yang berhubungan dengan pengembangan ekowisata; memperhatikan atau tidaknya masyarakat dalam menerima informasi pariwisata yang kemudian mentaati, menuruti dan melaksanakannya; menerima, memelihara dan mengembangkan atau tidak hasil pembangunan ekowisata, memberikan masukan atau penilaian atau tidak terhadap pelaksanaan pembangunan ekowisata apakah sudah sesuai dengan rencana dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat atau tidak. Dimana ekowisata mempunyai kekhususan tersendiri yaitu mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan penduduk lokal, dan menghargai budaya local (Waja et al., 2019).

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang pengembangan ekowisata negatif hal ini berakibat pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk berinisiatif sendiri (mandiri) untuk meningkatkan potensi pariwisata dalam upaya mengembangkan ekowisata di daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan jarangnyanya masyarakat yang melakukan kegiatan yang menunjang kegiatan ekowisata. Jarangnyanya masyarakat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ekowisata di Indonesia dari hasil pengamatan di lapangan dapat disebutkan sebagai berikut yaitu masyarakat belum melakukan kegiatan konservasi lingkungan hal ini terlihat dari sistem pertaniannya yang masih menggunakan sistem lajur, dan belum menggunakan sistem terasering. Masyarakat sebagian besar belum menanam tanaman keras pada lahan pertanian yang miring begitu juga untuk tanah dengan kemiringan lebih dari 40° masih banyak yang belum ditanami tanaman keras. Selain itu untuk mendukung gerakan rehabilitasi tanah dan lahan masyarakat belum melakukan pembibitan tanaman keras sendiri, selama ini hanya menggantungkan bantuan bibit dari Pemerintah setempat.

Dari segi konservasi atau pelestarian lingkungan masyarakat kita juga belum sepenuhnya berperan serta, hal ini terlihat dengan masih seringnya terjadi erosi pada musim hujan, terjadinya alih fungsi lahan hutan yang termasuk zona penyangga yang dijadikan lahan pertanian dan belum ditanamnya tanaman keras pada

tanah-tanah yang miring dan pada lahan pertaniannya yang miring di sela-sela tanaman sayuran. Konservasi lahan merupakan hal yang penting bagi pengembangan ekowisata yang bersifat berkelanjutan, apabila lingkungan alam di Indonesia rusak atau terjadi degradasi lingkungan karena sistem pengolahan tanah yang tidak memperhatikan segi konservasi maka pariwisata di situ juga tidak akan berkembang, karena pariwisata pada dasarnya adalah menjual lingkungan.

Peran Universitas Dalam Kebijakan Pengembangan Ecowisata

Untuk mengkaji suatu tempat pantas dijadikan obyek wisata yang memenuhi kriteria kecukupan sumber daya serta dampak yang ditimbulkan akibat pengembangan obyek wisata bagi masyarakat disekitarnya, dibutuhkan keterlibatan universitas dengan kajian-kajian ilmiahnya. Sehingga pemilihan alternatif, tujuan pengembangan serta peningkatan kelembagaan dapat dituangkan dalam penyusunan kebijakan ekowisata yang nantinya diimplementasikan sesuai kondisi yang ada. Rencana yang disusun dalam perumusan kebijakan diharapkan mampu menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata (Kurniasari et al., 2013). Sehingga peran universitas dalam suatu kebijakan dimulai dari proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan ekowisata. Prinsip pengembangan ekowisata diarahkan pada penggalian obyek wisata alam yang belum berkembang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau wisatawan yang sudah berubah orientasi wisatanya mengarah pada wisata alternatif atau memilih wisata minat khusus.

Pengembangan obyek wisata baru wajib dikaji oleh para pakar secara multidisipliner. Karena pengembangan obyek wisata tidak semata-mata berorientasi pada keindahan dan keuntungan, namun juga harus memperhitungkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan alam. Hal tersebut membedakan ekowisata dengan wisata lainnya. Dalam hal inilah universitas memegang peran penting bagi kebijakan ekowisata. Sebagai produk wisata yang menitik beratkan pada aspek pendidikan dan informasi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan, aspek estetika, aspek etika dan reputasi, maka dalam perencanaan ekowisata harus diarahkan pada konsep, prinsip, dan analisis pasar yang terkait dengan hal tersebut.

Menurut From dalam (Susilawati & Armitage, 2004) konsep ekowisata bersifat outdoor; akomodasi dicipta dan dikelola oleh masyarakat lokal; serta memiliki perhatian terhadap lingkungan alam dan budaya lokal. Berdasarkan konsep tersebut, kegiatan ekowisata memiliki prinsip-prinsip: 1) mengurangi dampak negatif dari pariwisata; 2) membangun kesadaran dan penghargaan; 3) menawarkan pengalaman-pengalaman positif; 4) memberikan keuntungan finansial; 5) meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial & lingkungan; 6) menghormati HAM. Universitas sebagai instansi pendidikan berkontribusi untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab permasalahan dalam pengembangan ekowisata. Tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi penyedia pasar, akan tetapi bagaimana membuat kebijakan pariwisata yang sesuai dengan kondisi dan tujuan ekowisata dan memiliki sifat keberlanjutan. Keberlanjutan suatu obyek wisata akan terjadi apa bila masyarakat sekitar destinasi merasakan secara langsung manfaat positif dari kegiatan pariwisata (Krisnani & Darwis, 2015). Oleh karena itu maka aspek sosial budaya menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan. Bagaimana menciptakan konsep pariwisata yang mampu mempertahankan orisinalitas suatu destinasi wisata sehingga mampu meminimalisir degradasi fundamental destinasi wisata yang di bawa oleh wisatawan.

Universitas sebagai institusi pendidikan telah berkontribusi dalam kepariwisataan melalui kajian ilmiah terkait desa wisata dan program wisata, melalui pendampingan pembentukan desa wisata di beberapa obyek wisata. Namun masih belum maksimal karena kontribusi Universitas baru pada tataran implementasi kebijakan bukan pada perumusan kebijakan pariwisata. Universitas baru sebatas konsultan dalam mengkaji lokasi untuk dijadikan obyek wisata (desa wisata) dan mendampingi pemerintah dalam mewujudkan bentuk fisik desa wisata. Peran lebih terfokus pada implementasi kebijakan pariwisata yang dirumuskan pemerintah. Untuk dapat berkontribusi maksimal dalam kebijakan ekowisata sebagai program pariwisata berkelanjutan, semestinya Universitas ikut berpartisipasi mulai dari perumusan kebijakan, kemudian implementasi dan sampai pada evaluasi kebijakan itu sendiri.

Hasil kajian tentang sumber daya alam, kondisi sosial dan dampak wisata bagi masyarakat lokal bila suatu tempat dijadikan obyek wisata, diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah terhadap rencana suatu obyek wisata. Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak semata-mata menguntungkan pelaku pariwisata dan pemerintah dalam jangka pendek. Namun secara berkelanjutan memberi manfaat positif bagi masyarakat, alam dan budaya dimana obyek wisata tersebut dikembangkan. Sehingga tujuan pembangunan ekowisata tercapai sesuai tujuannya. Selain hasil kajian dan pendampingan dari universitas, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi semestinya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekowisata di Indonesia. Seperti penggunaan data elektronik tentang pencatatan data dan kunjungan wisatawan, penyediaan informasi tentang obyek wisata dan kriteria wisatawan yang

berminat dan boleh datang ke obyek tersebut, sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata sehingga dapat menekan konflik kepentingan yang muncul akibat pengembangan pariwisata.

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimulai dari perencanaan kebijakan ekowisata, implementasi kebijakan tersebut sampai pada evaluasi kebijakan ekowisata. Kerjasama antar aktor dalam suatu kebijakan memberi peluang setiap aktor untuk berkontribusi sesuai peran dan potensinya terhadap kebijakan tersebut. Demikian pula halnya dalam kebijakan ekowisata. Kerjasama antar aktor pemerintah, swasta (pelaku pariwisata), masyarakat lokal, media massa dan universitas sangat dibutuhkan. Kontribusi universitas sebagai aktor dalam kebijakan ekowisata di Indonesia masih harus ditingkatkan. Peningkatan kontribusi dapat dilakukan dengan mengintensifkan kerjasama antara Universitas dengan pemerintah sebagai leading sector dalam kebijakan ekowisata. Pemerintah harus bersedia membuka diri untuk melibatkan aktor-aktor kebijakan lain seperti universitas dalam perumusan kebijakan ekowisata. Kajian dari universitas juga harus merupakan kajian ilmiah murni bukan semata karena pesanan. Bila semua aktor kebijakan dapat memainkan perannya sesuai porsinya, maka kendala dalam ekowisata akan dapat diminimalisir dan pengembangan ekowisata akan mencapai tujuannya.

Peran Industri Dalam Kebijakan Pengembangan Ecowisata

Pariwisata merupakan industri perdagangan jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup peraturan pergerakan wisatawan dari negara asal ke daerah tujuan hingga kembali ke negara asalnya lagi itu adalah peran industri (Japri et al., 2020). Menurut (Aji et al., 2018) menyatakan bahwa pariwisata juga memberikan multiplier effects terhadap industri pariwisata. Peran industri dalam ekowisata yaitu berperan dalam peningkatan roda perekonomian daerah melalui pemanfaatan objek wisata untuk memperoleh benefit yang maksimal serta peran pemerintah dan masyarakat dalam objek wisata agar tetap berkelanjutan (Damiasih, 2013). Dalam tahap perencanaan, industri berperan aktif dalam pengembangan ekowisata berbasis komunitas dengan: (1) berpartisipasi secara aktif dalam merancang pengembangan ekowisata yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (2) mendukung serta mengadakan forum diskusi dengan lembaga pembiayaan sehingga para pelaku bisnis keuangan dapat lebih memahami pola bisnis ekowisata yang sedang dikembangkan.

Dari segi pengelolaan ekowisata, industri berperan dalam mengembangkan sebuah unit-unit ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Koperasi untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan para wisatawan, mulai dari unit usaha makanan, souvenir, MCK, transportasi, penginapan, parkir hingga pemandu wisata. Juga mengembangkan paket-paket wisata yang mengedepankan budaya, seni dan tradisi lokal. Selanjutnya industri juga berperan dalam pemeliharaan kawasan ekowisata yang beruoa pengembangan prasarana program pemberdayaan masyarakat. Peran ini dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai pengelola ekowisata dengan memberikan edukasi kepada wisatawan akan pentingnya pelestarian suatu kawasan pariwisata. Mengembangkan skema dimana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya (stay and volunteer).

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia Tahun 2009, ada dua aspek yang sangat berkaitan dan perlu dibahas secara bersamaan jika ingin mengembangkan ekowisata berbasis komunitas sebagai satu usaha yang berhasil. Usaha harus layak secara ekonomi, mendapatkan hasil yang signifikan untuk masyarakat setempat, dan dikelola secara profesional. Kemudian usaha tersebut perlu adil, bermanfaat untuk masyarakat lokal sebagai mitra utama dan pendidikan dan pelatihan. Sehingga bisa dikatakan bahwa peran publik atau masyarakat dalam pengembangan ekowisata yaitu memiliki kesempatan untuk ikut dalam pembangunan, ada kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan, ada kemauan untuk berperan serta. Oleh karena itu peran serta masyarakat tidak hanya sebatas keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tetapi lebih lanjut peran serta juga mengandung pengertian bahwa masyarakat terlibat dalam setiap tahap dari suatu kegiatan sampai dengan menilai apakah pembangunan sudah sesuai dengan rencana dan dapat meningkatkan ekonominya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Larantika, 2019) menyatakan bahwa untuk dapat menanggulangi kendala dalam pengembangan ekowisata, diperlukan kebijakan yang melibatkan kerjasama semua aktor kebijakan.

Kerjasama semua aktor memberi kesempatan aktor tersebut untuk berkontribusi sesuai peran dan kompetensinya masing-masing dalam pengembangan ekowisata. Kontribusi Warmadewa sebagai salah satu aktor kebijakan belum maksimal. Kontribusi dapat lebih maksimal bila keterlibatannya dimulai dari perumusan kebijakan ekowisata, tidak semata-mata pada implementasi kebijakan yang sudah ada. Kontribusi dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah. Bila semua aktor kebijakan dapat memainkan perannya sesuai porsinya, maka kendala dalam ekowisata akan dapat diminimalisir dan pengembangan ekowisata akan mencapai tujuannya. Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi dan sosial yang signifikan dalam beberapa dasawarsa terakhir di banyak negara

(berkembang), wilayah, masyarakat, investor menaruh perhatian khusus pada dunia pariwisata dan bahkan terjun melibatkan diri dalam dunia Pariwisata (Firdaus & Tutri, 2017).

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah terkait ekowisata diterbitkan pada tahun 2010 mengatur tentang pengembangan ekowisata daerah. Permendagri tersebut hingga tahun 2011 masih menjadi satu-satunya kebijakan tertulis yang diterbitkan oleh Kemendagri berkaitan dengan ekowisata dan menjadi pedoman bersama untuk pengembangan ekowisata daerah. Peran publik atau masyarakat dalam pengembangan ekowisata yaitu memiliki kesempatan untuk ikut dalam pembangunan, ada kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan, ada kemauan untuk berperan serta. Oleh karena itu peran serta masyarakat tidak hanya sebatas keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tetapi lebih lanjut peran serta juga mengandung pengertian bahwa masyarakat terlibat dalam setiap tahap dari suatu kegiatan sampai dengan menilai apakah pembangunan sudah sesuai dengan rencana dan dapat meningkatkan ekonominya. Universitas sebagai institusi pendidikan telah berkontribusi dalam kepariwisataan melalui kajian ilmiah terkait desa wisata dan program wisata, melalui pendampingan pembentukan desa wisata di beberapa obyek wisata. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimulai dari perencanaan kebijakan ekowisata, implementasi kebijakan tersebut sampai pada evaluasi kebijakan ekowisata. Peran industri dalam ekowisata yaitu berperan dalam peningkatan roda perekonomian daerah melalui pemanfaatan objek wisata untuk memperoleh benefit yang maksimal serta peran pemerintah dan masyarakat dalam objek wisata agar tetap berkelanjutan.

Referensi

- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati). *Conference On Public Administration And Society*, 1(01).
- Aji, R. R., Pramono, R. W. D., & Rahmi, D. H. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Wilayah Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Planoearth*, 3(2), 57–62.
- Anggela, M. M., Karini, N. M. O., & Wijaya, N. M. S. (2017). Persepsi Dan Motivasi Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daya Tarik Wisata Jembong Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ipta P-Issn*, 5(2), 2017.
- Asmin, F. (2018). Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai Dari Konsep Sederhana. *Universitas Andalas (Unand)*, 9–11.
- Damiasih, D. (2013). Ekowisata Taman Nasional Komodo. *Jurnal Kepariwisataaan*, 7(3), 39–50.
- Firdaus, F., & Tutri, R. (2017). Potensi Pengembangan Ekowisata Di Nagari Kotobaru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. *Jurnal Kawistara*, 7(2), 144–155.
- Ibrahim, H. M. M. (2015). Green Synthesis And Characterization Of Silver Nanoparticles Using Banana Peel Extract And Their Antimicrobial Activity Against Representative Microorganisms. *Journal Of Radiation Research And Applied Sciences*, 8(3), 265–275.
- Japri, M., Aisyah, S., Trisnomurti, R., & Awang, S. S. T. I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Kalimantan Timur.
- Krisnani, H., & Darwis, R. S. (2015). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Kurniasari, E., Rustiadi, E., & Tonny, F. (2013). Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Studi Kasus Komunitas Kelurahan Kalimulya Kota Depok. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2).
- Larantika, A. A. A. D. (2019). Kontribusi Warmadewa Dalam Kebijakan Ekowisata. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 3(2), 84–89.
- Manalu, B. E., Latifah, S., & Patana, P. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Ekowisata Di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Public Perception Of Ecotourism Development In Huta Ginjang Village, Sianjur Mula-Mula Sub-District, Samosir). *Peronema Forestry Science Journal*, 2(1), 54–64.
- Mastur, M. (2003). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembangunan Fisik Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Malang. *Jurnal Penelitian*, 15(2), 632–642.
- Meilani, R., & Muntasib, E. K. S. H. (2013). Peran Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengembangan Ekowisata Di Indonesia. *Media Konservasi*, 18(3).
- Nasution, R. H., Avenzora, R., & Sunarminto, T. (2018). Analisis Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata Di Indonesia. *Media Konservasi*, 23(1).

- Permendagri. (2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.
- Prihanta, W., Syarifuddin, A., & Zainuri, A. M. (2017). Pembentukan Kawasan Ekonomi Melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi*, 14, 73–84.
- Rivai, V. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rulloh, N. (2018). Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Padamasyarakat Sekitar Objek Wisata Lombok Resort Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat). Uin Raden Intan Lampung.
- Saldana, J. (2014). *Thinking Qualitatively: Methods Of Mind*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan R&D*. Pt.Alfabet. Bandung.
- Sunarto, E. (1994). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Pemilik Terhadap Struktur Hutan Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Suryani, A. I. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, Dan Pendidikan Geografi*, 3(1).
- Suryanti, P. E., & Indrayasa, K. B. (2021). Perkembangan Ekowisata Di Bali:“Upaya Pelestarian Alam Dan Budaya Serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal.” *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), 48–56.
- Susilawati, C., & Armitage, L. (2004). Do Public Private Partnerships Facilitate Affordable Housing Outcomes In Queensland? *Australian Property Journal*, 38(3), 184–287.
- Waja, A. G., Un, P., & Kaho, N. (2019). Pengaruh Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Budaya Dan Ekonomi Di Desa Wisata Waturaka, Daerah Penyangga Taman Nasional Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (Ntt). *Jurnal Wana Lestari*, 1(1), 1–9.